

FINALISASI RANCANGAN RENCANA KERJA TA 2026 DAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DIY
25 FEBRUARI 2025



jogja
istimewa



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Outline Rancangan Rencana Kerja TA 2026 dan Rancangan Standar Pelayanan

1. Dasar Hukum
2. Struktur Organisasi
3. Tugas dan Fungsi
4. Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
5. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah
6. Tema RKPD DIY 2026
7. Target Realisasi Program PEMDA DIY Tahun 2024
8. Target Indikator Kinerja Biro yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
9. Realisasi Indikator Kinerja Biro yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
10. Isu Strategi dan Permasalahan
11. Usulan Program Kegiatan Tahun 2026



1. DASAR HUKUM BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH DIY

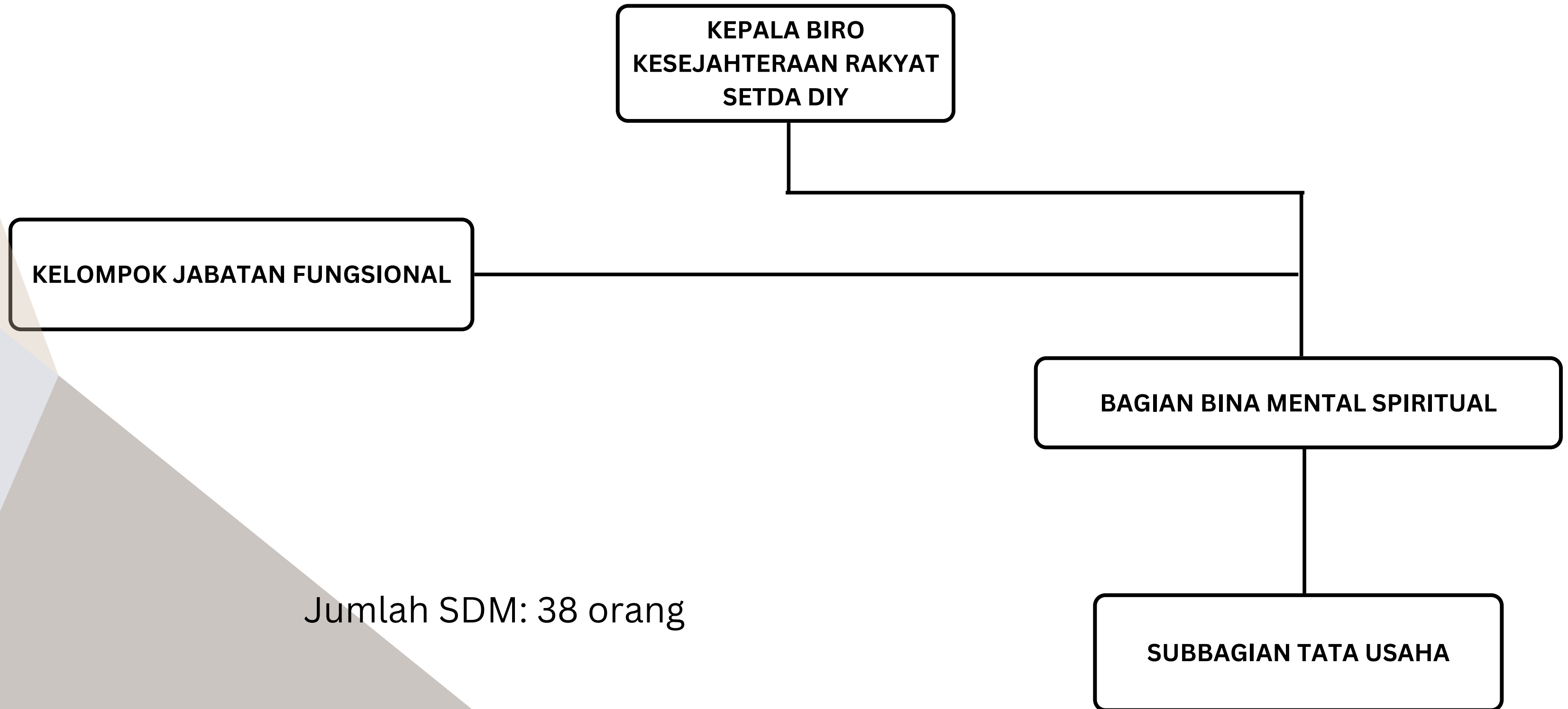
Dasar Hukum Pembentukan :

1. Perdais 1/2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pergub DIY Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah



2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY memiliki susunan organisasi sebagai berikut.



3. TUGAS DAN FUNGSI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH DIY

Tugas

Melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis Urusan Kesejahteraan Rakyat

Fungsi

1. Penyusunan program kerja biro, penyiap bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, serta perpustakaan dan kearsipan;
2. Fasilitasi kehidupan beragama;
3. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Biro;
4. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
8. Pelaksanaan ketugasan lain yang relevan.



4. PELAYANAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DIY





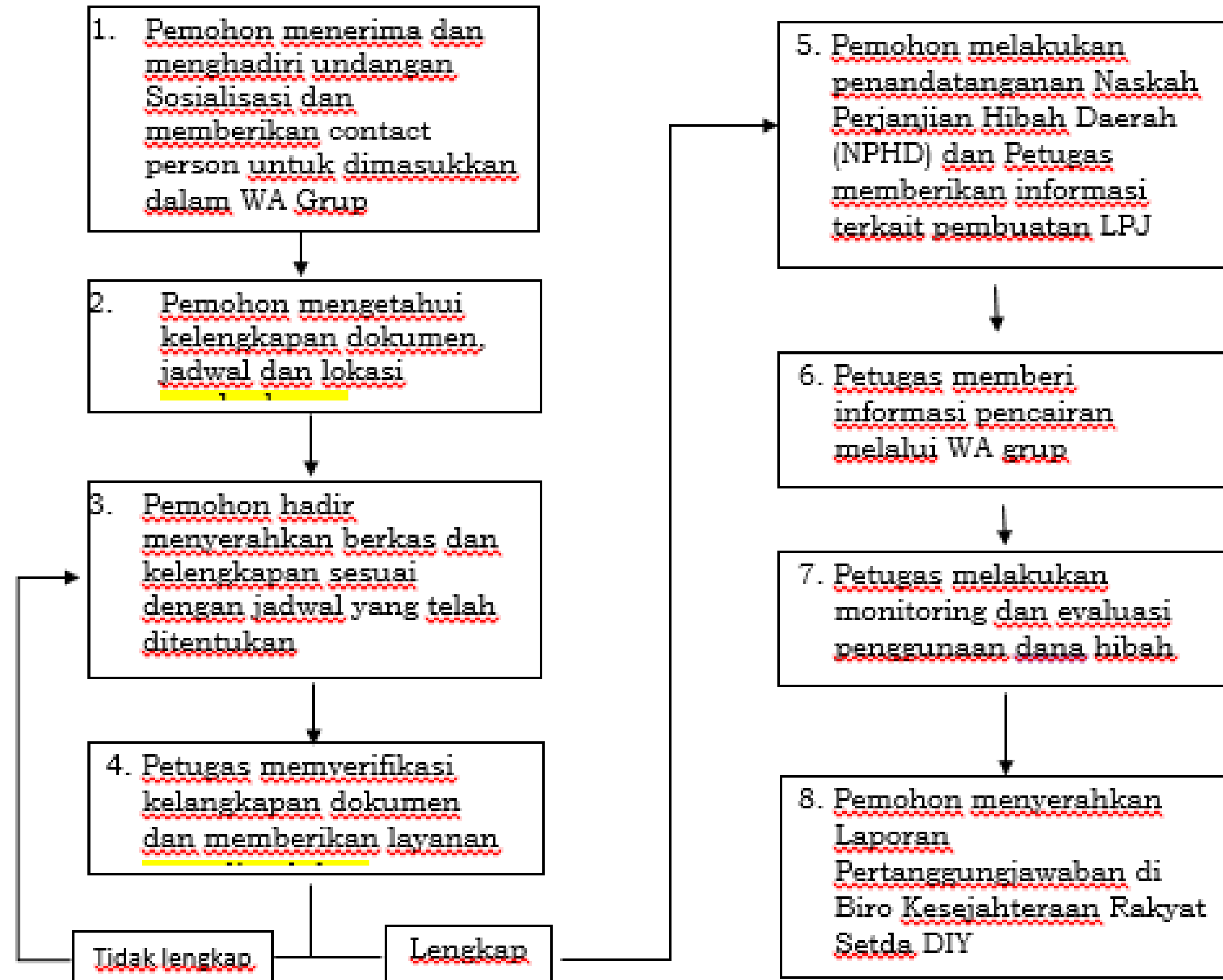
1. Layanan Fasilitasi Hibah Keagamaan

Kegiatan fasilitasi pelayanan masyarakat yang dilaksanakan yaitu penyaluran hibah keagamaan untuk 5 (lima) agama, terdiri dari: Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Tempat Ibadah Lembaga Keagamaan sudah terdaftar sebagai calon penerima hibah dalam SK Gubernur DIY pada tahun anggaran berjalan.
2. Menerima undangan Sosialisasi dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.
3. Membawa berkas/dokumen dengan kelengkapan yang telah ditentukan.
4. Berkomitmen untuk menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah yang diterima sesuai ketentuan

Layanan Fasilitasi Hibah Keagamaan





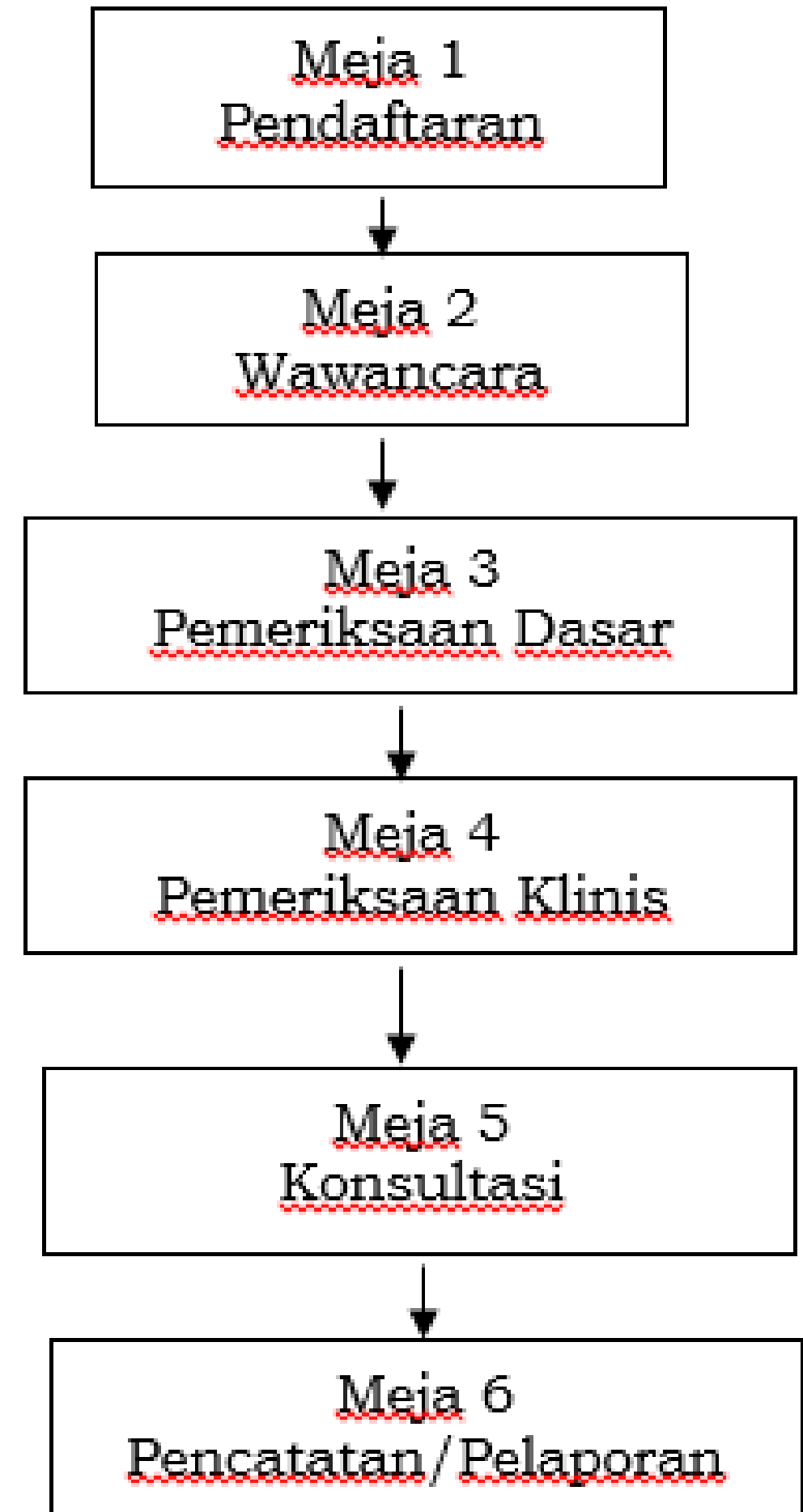
2. Pelayanan Posbindu Satriya

Peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi ancaman yang serius dalam upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat. Posbindu PTM di tempat kerja merupakan salah satu upaya pengendalian faktor risiko PTM yang dilakukan untuk meningkatkan status kesehatan pekerja.

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Karyawan/Karyawati Komplek Kepatihan.
2. Mengisi data di aplikasi yang disediakan.
3. Membawa KTP/identitas lain.

Pelayanan Posbindu Satriya





3. Layanan Informasi Publik

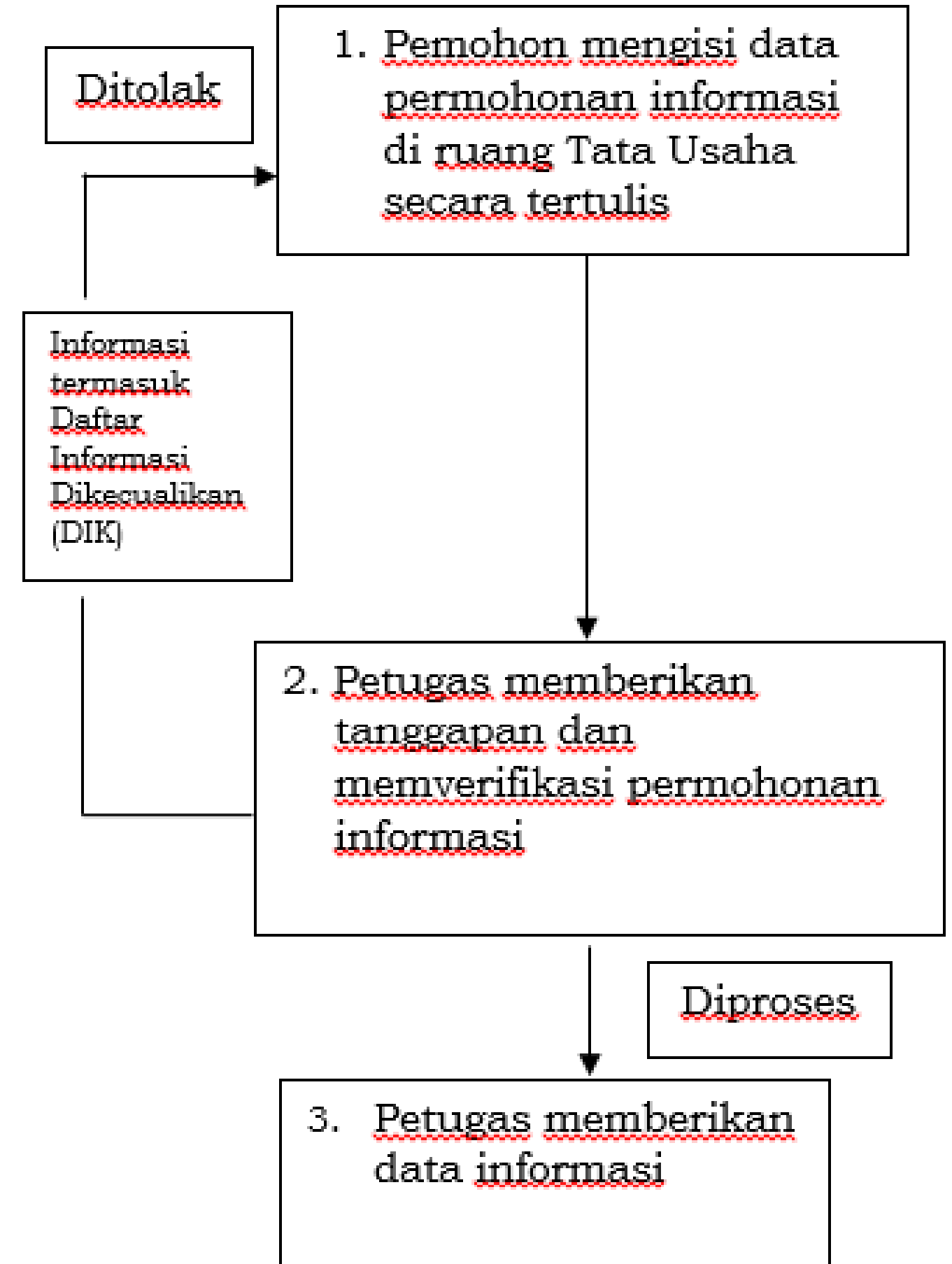
Layanan Informasi Publik menjadi salah satu layanan yang dibutuhkan masyarakat. Diantaranya untuk mendapatkan informasi mengenai Jenis Pelayanan di Biro Kesra secara umum maupun informasi yang berkaitan dengan data keagamaan, kesehatan dan sumber daya manusia

PERSYARATAN PELAYANAN

Untuk informasi terkait data-data yang ada di Biro berlaku persyaratan berikut:

1. Mengisi formulir permohonan/register/buku tamu
2. Membawa kartu identitas
3. Surat pemohon bagi pemohon dari instansi/lembaga.

Layanan Informasi Publik





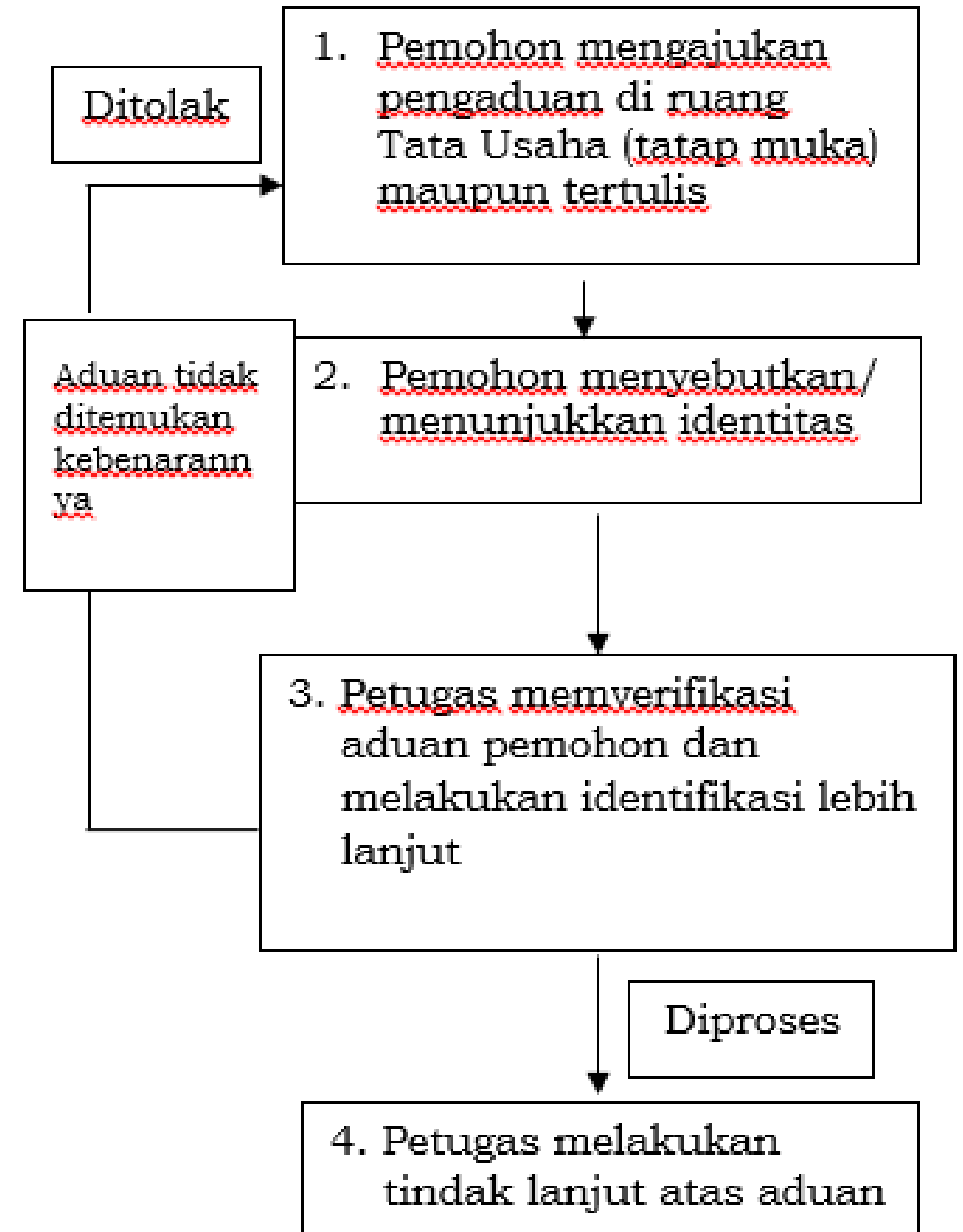
4. Pelayanan Pengaduan

Layanan Pengaduan menjadi salah satu layanan yang dibutuhkan masyarakat. Diantaranya untuk mendapatkan informasi pengaduan atas permasalahan yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung ditangani di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

PERSYARATAN PELAYANAN

Pengguna Layanan Pengaduan, dilengkapi dengan identitas yang jelas

Pelayanan Pengaduan





Saluran Informasi dan Aduan

- Datang langsung ke meja informasi
- Email : birokesra@jogjaprov.go.id
- Website: <http://binamentals.jogjaprov.go.id>
- Telepon : 0274-562811 /WA: 0898-5628111
- E-Lapor: <https://lapor.jogjaprov.go.id/>





5. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DIY



VISI

Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.



VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1) Meningkatkan kualitas hidup- kehidupan- penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	1. Terwujudnya kualitas hidup masyarakat	a) IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>) b) Indeks Kebahagiaan
	2) Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya setempat	2. Mengecilnya ketimpangan wilayah	Indeks Williamson
	3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI	3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi
	4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.	4. Terwujudnya lingkungan hidup yg lebih baik	IKLH



Kinerja Pemda DIY s.d. Triwulan IV, 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024	% realisasi
1.1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat.	IGI (Inclusive Growth Index)			Indeks	6.42	6.71	104.52
	Indeks Kebahagiaan			Indeks	73.41	71.7	97.67
	Angka Inclusive Growth Index (IGI) 6,15 (2021) menjadi 6,64 (2026)	1.1.1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan.	Angka Kemiskinan	%	10.16	10.4	97.69
		1.1.2. Penghidupan ekonomi yang layak.	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	%	5.1 - 5.6	5.03	98.62
			Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	30.23	51.47	170.26
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.51 - 3.81	3.48	100.86
			Inflasi	%	2.00 - 4.00	1.28	156.25
		1.1.3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81.36	81.62	100.32
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	74.78	67.9	90.80

6. TEMA RKPD DIY 2026



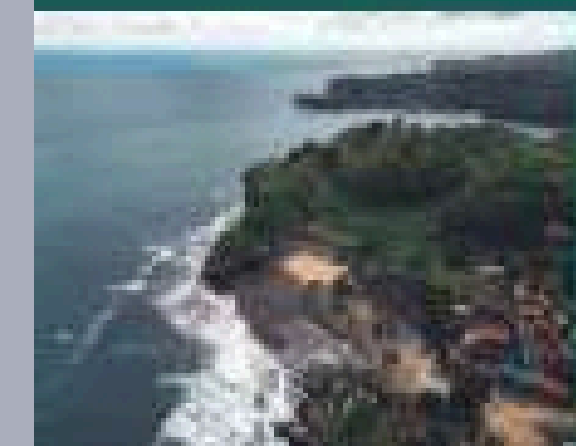
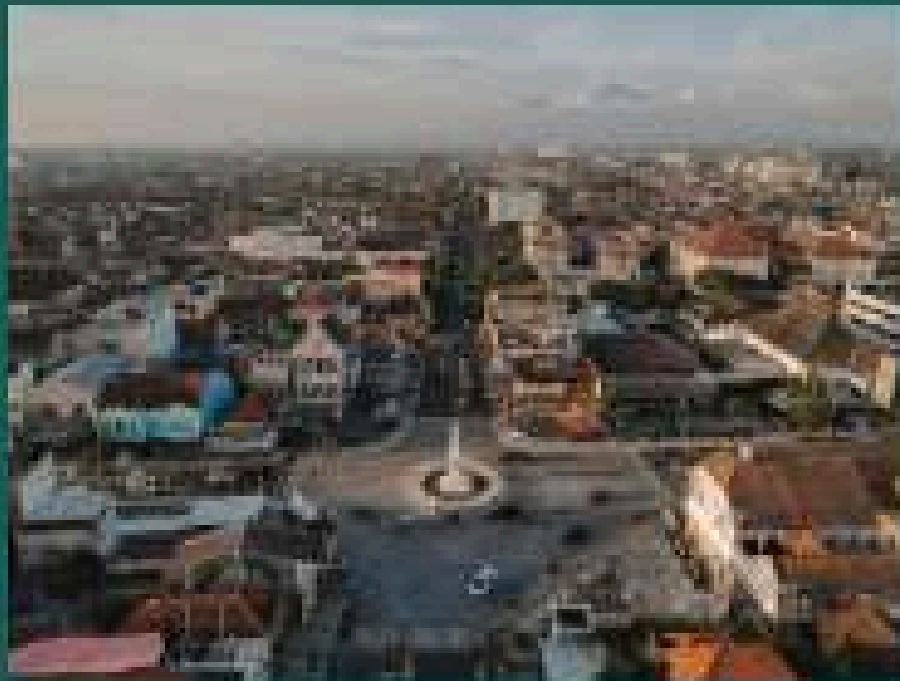
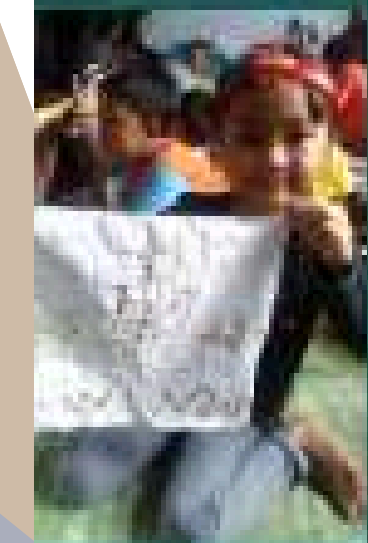
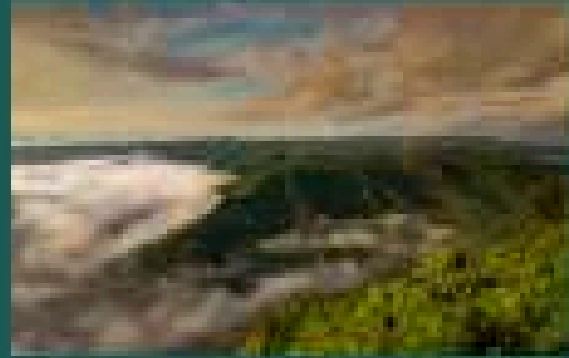
“

Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
melalui Penguatan
Produktivitas Sektor
Unggulan serta
Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi

”

Prioritas Pembangunan Daerah

- 01 Penurunan tingkat kemiskinan
- 02 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
- 03 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
- 04 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
- 05 Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan
- 06 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram



7. REALISASI PROGRAM PEMDA DIY TAHUN 2024 & TARGET TAHUN 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	Target 2026	Kondisi Akhir 2027
1	Indeks Gini	0,435	0,411	0,407
2	Persentase Desa Mandiri	90,56	77,55	85,2
3	Harapan lama sekolah	15,7	15,77	15,78
4	Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum	78,57	78,37	79,37
5	Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum	65,34	61,51	62,5
6	Angka Harapan Hidup	75,36	75,24	75,27
7	Prevalensi Stunting	11,96	11,8	10,7
8	Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak.	96,32	99,401	100
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,46	77,97	78,27
10	Total Fertility Rate	1,81	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2
11	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY	596	361	367

8. TARGET INDIKATOR KINERJA BIRO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Kondisi Awal (Base Line 2022)	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
A.	Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	%	N/A	N/A	40	60	80	100	100
1.	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	%	N/A	N/A	67,5	80	90	100	100

LANJUTAN..

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Kondisi Awal (Base Line 2022)	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
2.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	N/A	N/A	A (88,18)	A (88,19)	A (88,20)	A (88,21)	A (88,21)

9.REALISASI INDIKATOR KINERJA BIRO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR / META INDIKATOR	Satuan	BASE LINE 2022	REALISASI 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPJMD / REN STRA
						Target	Realisasi	%	Kriteria / Kode	
A.	Tujuan: Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	<u>Indikator:</u> Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda <u>Meta Indikator:</u> Jumlah kebijakan yang mendukung program pemda di tahun bersangkutan terhadap total program pemda yang akan didukung di akhir periode.	%	N/A	N/A	40	42,85	107	Sangat Baik	100
1.	Sasaran 1: Meningkat nya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkat nya fasilitasi kehidupan beragama	<u>Indikator:</u> Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan <u>Meta Indikator:</u> Komposit rumusan bahan kebijakan yang menjadi draf kebijakan serta fasilitasi keagamaan	%	N/A	n/a (perbedaan indikator karena mengacu RPD)	67,5	160	237	Sangat Baik	100

LANJUTAN..

No	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR / META INDIKATOR	Satuan	BASELINE 2022	REALISASI 2023	Tahun 2024				TARGET AKHIR RPJMD / REN STRA
						Target	Realisasi	%	Kriteria / Kode	
2.	Sasaran 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerinta han di perangkat daerah	<u>Indikator:</u> Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah <u>Meta Indikator:</u> Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	kategori	A	A	A (88,18)	92,07	104,41	Sangat Baik	A (88,21)



10. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN



Bidang Mental Spiritual :

1. Daftar antrian tunggu jamaah haji yang cukup lama sehingga rata-rata usia jamaah haji yang diberangkatkan semakin lanjut usia;
2. Belum optimalnya peran rumah ibadah sebagai sarana dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat yang baik;
3. Fasilitasi pemberdayaan Pesantren sebagai wahana pendidikan karakter bagi generasi muda belum dapat diwujudkan;
4. Dukungan daerah dalam melakukan fasilitasi kelembagaan umat beragama dan aktivitas festival keagamaan kurang memadai;
5. Penguatan dan penghargaan kepada kaum Rois sebagai panutan agama berbasis budaya belum dapat dilakukan tokoh agama yang berperan di masyarakat DIY;
6. Peran lembaga Amil Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf DIY perlu digalang untuk berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan DIY.

Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

- **Bidang Pendidikan :**

1. Ketimpangan antar wilayah kab/kotaterkait HLS dan RLS;
2. Belum maksimalnya sistem zonasi pendidikan karena ketimpangan kualitas/mutu di setiap daerah;
3. Belum maksimal tata kelola pendidikan, relevansi minat bakat, serapan dunia kerja;
4. Belum optimalnya pelayanan sarana olahraga;
5. Prestasi olahraga dalam kompetisi perlu terus ditingkatkan;
6. Belum optimal pengembangan kapasitas kaum muda yang berperan dalam pembangunan;
7. Perluditingkatkan wirausaha muda untuk mengembangkan potensi;
8. Angka pengangguran di usia muda masih tinggi;
9. Belum optimalnya implementasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.



- **Bidang Kesehatan :**

1. Ketimpangan kualitas layanan kesehatan antar wilayah Kab/Kota di DIY;
2. Belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan yang memenuhi standar nasional;
3. Prevalensi penyakit tidak menular melebihi rata-rata nasional ;
4. Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular;
5. Belum optimalnya upaya pencegahan stunting;
6. Angka kasus kematian ibu, bayi, dan balita masih cukup tinggi
7. Prevalensi gangguan jiwa Skizofrenia di DIY masih tinggi;
8. Belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat;
9. Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan.
10. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan jaminan Kesehatan.



- **Bidang Sosial :**

1. Tingkat Kemiskinan DIY diatas kemiskinan nasional;
2. Tingginya Ketimpangan Pendapatan di DIY;
3. Ketimpangan antar wilayah dalam distribusi SDM, SDA, Aksesibilitas dan persebaran investasi;
4. DIY menuju Propinsi inklusi;

Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.

- **Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan :**

1. Belum optimalnya upaya penggalian reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur;
2. Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan.
3. Belum optimal pengembangan potensi budaya mendukung peningkatan ekonomi di pedesaan;
4. Belum maksimal pengelolaan dan pengembangan museum di DIY;
5. Belum optimal jumlah perpustakaan yang terakreditasi;
6. Minat baca dan budaya literasi masih rendah;
7. Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip belum sesuai dengan standar pengelolaan arsip;
8. Pelaksanaan penyusutan berupa pemindahan, pemusnahan, maupun penyerahan arsip belum sesuai standar;
9. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sudah tidak relevan.

- **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :**

1. Reformasi Kalurahan dan Percepatan Pembangunan Perdesaan;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat;
3. Kenakalan anak, trafficking anak, dan Pelindungan anak belum dilaksanakan secara penuh;
4. Kurangnya Ketahanan Keluarga.

**11. USULAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2026
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA DIY**



PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
KEGIATAN : ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN
PAGU : RP 6.387.911.400,00

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Pengembangan dan Implementasi Nilai - Nilai Luhur dalam Masyarakat	1. Golongan perlombaan MTQ Daerah yang dilombakan (48 golongan) 2. Golongan perlombaan MTQ Nasional yang diikuti (48 golongan) 3. Golongan perlombaan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Daerah yang dilombakan (34 golongan) 4. Kategori perlombaan Utsawa Dharma Gita (UDG) Daerah (34 kategori) 5. Kategori perlombaan / mata lomba Pesparani Nasional (13 kategori) 6. Jumlah kegiatan pembinaan mental spiritual (9 kali) 7. Jumlah peringatan hari besar keagamaan (8 kali: Isro' Mi'roj, Nuzulul Qur'an, Maulid Nabi, Nyepi, Waisyak, Paskah, Natal, Hari Santri) 8. BKK Kampung Berkah



PROGRAM : PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEGIATAN : FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL
PAGU : RP 16.805.719.400,-

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	1. Jumlah Tempat Ibadah penerima hibah (500 tempat ibadah)
2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	1. Jumlah Lembaga/organisasi Keagamaan penerima hibah (8 lembaga/organisasi : MUI DIY, PW Muhammadiyah, PW NU, BAZNAS DIY, PGI, Kevikepan, Walubi, PHDI) 2. Jumlah SK tim Petugas Haji Daerah (1 dokumen) 3. Pengiriman Petugas Haji Daerah (27 Petugas)



PROGRAM : PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEGIATAN : FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR

PAGU : RP 502.000.000,-

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Laporan Hasil Kajian Pemetaan Mutu Pendidikan Pasca Penerapan Kebijakan Zonasi Sekolah
		Laporan Hasil Kajian Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Khusus Olahraga (SKO) di DIY
		Laporan Hasil Kajian Studi Kelayakan Pendirian SLB Negeri di Gunung Kidul
		Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Peran Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M)



PROGRAM : PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEGIATAN : FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR

PAGU : RP 196.756.400,-

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Laporan Korsin dan Monev Kebijakan Kesehatan Masyarakat
		Laporan Korsin dan Monev Kebijakan Pelayanan Kesehatan
		Laporan Rakorda dan Ekpose Monev Kebijakan Germas DIY & Kab / Kota se DIY
		Laporan Ekpose Monev Kebijakan Kesehatan Jiwa DIY
		Laporan Posbindu Satriya
		Laporan Rakorda dan Ekpose Monev Kebijakan SPM Bidang Kesehatan DIY



PROGRAM : PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEGIATAN : FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR

PAGU : RP 85.098.400,-

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial :	Kajian Pengukuran Kesiapan DIY Menuju Provinsi Inklusi
		Korsin Kebijakan Bidang Sosial Terkait Tindak Lanjut Pergub DIY tentang RAD Penyandang Disabilitas
		Monev Kebijakan Bidang Sosial Terkait Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan



PROGRAM : PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEGIATAN : FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR

PAGU : RP 64.000.000,-

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan di DIY
		Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Potensi Wirausaha Pemuda DIY

PROGRAM : PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEGIATAN : FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR
PAGU : RP 255.295.200,-

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rapergub RAD Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
		Rapergub Pemenuhan Hak Anak (menunggu Perda Provila)
		Kajian Pelaksanaan Posyandu di DIY
		Laporan Hasil Korsin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Laporan Hasil Korsin Keluarga Berencana-Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk
		Monev hasil Kajian Perlindungan Anak bagi ABH pasca rehabilitasi (SE Nomor 400.2.10/7463)
		Monev hasil Kajian Pencegahan TPPO di DIY (SE Nomor 400.2.1/8560)



**PROGRAM : PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
PAGU : RP 10.666.600,-**

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
PAGU : RP 13.778.000,-

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD



PROGRAM : PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN : ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
PAGU : RP 12.435.000,-

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
PAGU : RP 262.116.930,-

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barang cetakan dan Penggandaan
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Pembayaran langganan surat kabar dan majalah 2. Pembelian buku referensi/Peraturan Perundangundangan
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Barang Cetakan dan Penggandaan
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan



PROGRAM : PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PAGU : RP 275.291.200,-

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PAGU : RP 8.900.000,-

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Surat keluar 2. Surat masuk
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja analis bina mental 1 orang Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PAGU : RP 174.928.000,-

NO	Sub Kegiatan	Keluaran
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
3.	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor



BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦧꦶꦂꦺꦴꦏꦺꦴꦗꦿꦲꦠꦺꦫꦂꦏꦪꦠ

TERIMAKASIH

